

**REKOMENDASI KEBIJAKAN OPERASIONAL
PUSAT INFORMASI KONSELING REMAJA (PIK R)
PADA REMAJA SLTP DAN SLTA**

Oon Sopiah

Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS Ronggowaluyo Teluk Jambe Timur Karawang 41361

ABSTRAK

Pusat Informasi Konseling Remaja merupakan salah satu wadah remaja dalam pelayanan informasi dan konsultasi KRR. Kelompok PIK R di SLTP dan SLTA Karawang mencapai 2,63%, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rekomendasi kebijakan operasional pelaksanaan PIK R pada remaja SLTP dan SLTA di Karawang Tahun 2015. Desain penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di tiga sekolah. Informan penelitian ini terdiri informan kunci dan pendukung. Narasumber berasal dari DPRD, BKBPP, Disdikpora, dan Kepala Sekolah. Penelitian menggunakan studi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi, dengan metode analisis tematik. Hasil penelitian mendapatkan rekomendasi kebijakan operasional berupa pembuatan MOU untuk mengurangi permasalahan. BKBPP hendaknya segera merealisasikan rekomendasi melalui penandatanganan MOU antara BKBPP dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Alternatif rekomendasi, Kebijakan operasional, MOU, PIK R

ABSTRACT

Adolescent Counseling Information Center is one container for a teenager in the ministry of information and consultation KRR. PIK R group in karawang reached 2.63%. This study aims to determine the operations policy in the implementation recommendation PIK R in adolescents junior and senior in Karawang 2015. The study design used qualitatively method with case study approach. The study was conducted in three school institutions. Informant of this research are key and support informant. Expert judgment comes from Parliament, BKBPP, Disdikpora, and Principal, The study uses documentary studies, in-depth interviews, and observation with thematic analysis method used. Results of studies have operational policy recommendations that manufacture MOU. Making the MOU is an operational policy recommendations are most appropriate to break down the existing problems. BKBPP should immediately implement recommendations MOU signing between BKBPP with related institutions.

Keywords: Alternative recommendation, operational policies, MOU, PIK R

Pendahuluan

Masa remaja merupakan peralihan yang disebut masa transisi¹. Jumlah remaja mengalami peningkatan sekitar 1,3 milyar. Hal ini mempengaruhi Angka Fertilitas Total/*TFR*². Jumlah remaja di Jawa Barat sebesar 27,39%³. Remaja dihadapkan dengan berbagai resiko Triad KRR⁴. Pembinaan dilaksanakan dari segi fisik, psikologis dan sosial⁵. Saat ini remaja memiliki permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks⁶.

Pemerintah Indonesia berupaya menindaklanjuti melalui Peraturan Presiden No. 62/2009 tentang BKKBN yang merujuk kepada program dunia dalam *MDG's* tentang pentingnya meningkatkan status kesehatan reproduksi remaja. Program GenRe secara optimal dilakukan dengan mengembangkan PIK R⁷. Diperkuat Peraturan Kepala BKKBN tentang Pedoman pengelolaan PIK R dan Pedoman Akselerasi Program GeRre melalui "*New Initiative*" Tahun 2014⁸.

Jumlah PIK R sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 56,9% kelompok mayoritas SLTA, sedangkan SLTP belum berkembang⁸.

Tahun 2014 sasaran program PIK R di SLTP sebanyak 95.725, SMA 30.448, di SMK 42.312 yang tersebar di 263 institusi sekolah. Tahun 2012, BKBPP melakukan sosialisasi untuk menjawab permasalahan remaja di Karawang⁹.

PIK R mengedepankan tindakan *promotif* dan *preventif* melalui penyampaian informasi dan konseling mengenai KRR. Sosialisasi

dilakukan secara bertahap. Tahun 2013 terdapat 4 kelompok PIK R, dan tahun 2014 menjadi 6 kelompok. Melalui gerakan “*New Inisiative*” dapat mempercepat terwujudnya “PIK R Tegar”. BKBPP melakukan orientasi terhadap 104 orang guru BK dan 208 siswa-siswi sebagai Pendidik Sebaya. Dari kegiatan tersebut, dipilih 4 kelompok PIK R sebagai “Model PIK R Tegar” yang merupakan “*Pilot Proyek*”¹⁰.

Tahun 2015 kelompok PIK R mencapai 2,63 %, jumlah yang sedikit, tidak cukup memberikan informasi dan konseling untuk menjawab masalah remaja di sekolah, maka perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai rekomendasi kebijakan operasional dalam pelaksanaan PIK R Remaja SLTP dan SLTA di Karawang untuk diketahuinya rekomendasi kebijakan operasional dalam pelaksanaan PIK R pada remaja SLTP dan SLTA di Karawang.

Metode Penelitian

Desain penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus⁴. Metode yang digunakan *Policy Analytical Process* dari versi *Patton-Savicky* yang dimodifikasi, dan disajikan dengan format *USG dan SWOT*. Penelitian dilaksanakan di SMKN 3 Kondang Jaya, SMPN 3 Karawang, dan SMPIT Mentari Ilmu pada bulan Januari 2015 s.d September 2015. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* dan strategi variasi maksimal.

Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis tematik mengidentifikasi 16 tema penelitian ini, yaitu : PERDA, target, sosialisasi dan promosi, kewajiban, kurikulum tambahan, ekstrakurikuler, APBD, pembentukan, ramah remaja, komitmen, sarana prasarana, pembinaan, monitoring dan evaluasi, *reward*, pencatatan pelaporan, SDM, konsultasi/ fasilitasi.

Peraturan Daerah (PERDA)

Pelaksanaan PIK R mengacu kepada Peraturan Kepala BKKBN tentang Pedoman Pengelolaan PIK R. Terdapat PERDA Kepemudaan dan Kota Layak Anak (KLA) yang memuat aspek keremajaan. BKBPP sudah merancang PERDA tentang KB yang di dalamnya mengatur PIK R, dan saat ini dalam tahap konsultasi dengan pakar hukum. Berikut hasil wawancara :

".....kalau melihat dari segi program yang berkesinambungan memang harus dimasukkan ke PERDA, menjadikannya program unggulan....."(X₁₃)

Pencapaian Target

Pelaksanaan PIK R di Karawang belum memiliki kebijakan yang mengatur target. Berikut wawancara :

.....targetnya setiap bulan seharusnya ada pembinaan sekitar 3 atau 4 kali dalam waktu 2 tahun, kendalanya keilmuannya minim(X₁₁)

Kewajiban Pelaksanaan PIK R

PIK R saat ini, belum memiliki aturan yang mewajibkan sekolah untuk ikut serta :

“....kalau bahasa wajib itu kaitannya dengan kebijakan operasional...harus difasilitasi, sarananya harus lengkap, dan pembinanya harus terpenuhi“ (X₁₄)

Menetapkan Kurikulum Tambahan

PIK R sebaiknya dimasukkan ke dalam kurikulum, sebagai pedoman penyelenggara pembelajaran yang didalamnya terdapat bahan materi yang berhubungan dengan KRR, dan penyampaiannya disesuaikan dengan kurikulum yang ada :

“.....bagus juga kalau dimasukin ke kurikulum. Mungkin kendalanya banyak ya...”(X₁₂).

Pelaksanaan PIK R sebagai Ekstrakurikuler

Pelaksanaan PIK R sebagai pilihan eskul mengacu kepada Provinsi. Saat ini terdapat satu kelompok PIK R yang sudah menjadi eskul. Untuk menjadi eskul harus disusun *blue printnya* dahulu, sebagai panduan kegiatan, seperti ungkapan :

“.....pertama harus ada bluprintnya sebelum jadi Eskul.....”(X₁₅)

Dukungan Sumber Dana APBD

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kegiatan PIK R tidak membutuhkan biaya besar seperti ungkapan berikut :

“.....kalau ada kegiatan untuk kita sendiri, dari sekolah sudah disiapkan dananya....” (X₄)

Pembentukan dan Pengembangan

Pembentukan pengembangan PIK R bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling di lingkungan komunitas remaja sekolah dan saat ini dikembangkan tahap Tegak dan Tegar, seperti ungkapan berikut :

“.....dengan sosialisasi akan mendorong mereka membentuk PIK R. Kalau sudah dibentuk kita akan bina PS dan KS, juga guru BK nya.....”(X₈)

Pengembangan dan peningkatan kualitas yang ramah remaja

Kegiatan pengembangan dan peningkatan kualitas yang ramah remaja bertujuan supaya remaja memperoleh informasi yang menarik minat, bercirikan dari, oleh, dan untuk remaja. Setiap kegiatan harus membuat remaja merasa nyaman, bersahabat, dan menjaga kerahasiaan.

“.....remaja itu dibikin nyaman dulu, kita mencoba menjadikan mereka sahabat.....” (X₁₁)

Komitmen dengan Stakeholder dan Mitra Kerja

Pelaksanaan PIK R belum memiliki kebijakan yang mengatur komitmen yang dituangkan secara tertulis.

“.....itu juga sudah ada tapi belum dituangkan dalam bentuk tertulis dalam suatu MOU.....”(X₈)

Sarana dan Prasarana

Saat ini ruangan konseling menggunakan ruangan BK dan kegiatan dilakukan di ruangan kelas, ruang OSIS, PMR dan yang lainnya. Media yang digunakan berupa laptop dan lembar balik yang difasilitasi BKBPP, tetapi itupun sangat terbatas. Akses terhadap *hot line*, jaringan internet dan jejaring sosial bersifat pribadi dan belum terpusat di BKBPP. Berikut hasil wawancara dengan informan:

“....Kurang ya, gendre kitanya cuma 1, tidak sebanding dengan jumlah siswa, sehingga kurang menarik, kita coba cara lain biar lebih menarik.....”(X₁₇).

Kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Selama ini belum ada kebijakan yang mengatur kegiatan pembinaan dan monev karena keterbatasan waktu. Kegiatan yang sudah dilaksanakan berupa kunjungan-kunjungan yang belum menyeluruh. Berikut hasil wawancara :

“.....belum sempet monev gitu, jadi memang BKBPP ataupun PLKB baru melakukan kunjungan-kunjungan.....”(X₁₅)

Reward

Berdasarkan hasil penelitian, selama ini *reward* disampaikan secara lisan berupa ucapan selamat dan terimakasih. Berikut hasil wawancara mendalam :

“.....dengan reward supaya kita lebih termotivasi...” (X₄)

Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan masih sangat terbatas karena belum diberikan pelatihan dan bimbingan serta belum ada format pedomannya. Catatan dibuat dengan format sendiri seperti absensi dan biodata siswa. Selama ini. Berikut hasil wawancara mendalam :

“....catatannya juga belum rapih, ada absensi, biodata siswa, format dari BKBPP, tidak ada buku panduan.....(sambil menunjukkan buku-buku kegiatan)” (X₁₇)

Peningkatan SDM

Untuk peningkatan SDM, BKBPP bersama BKKBN provinsi mengadakan pelatihan dan orientasi kepada Guru BK, PS dan KS. Berikut pernyataan informan :

“.....kadang-kadang kita juga pelatihan-pelatihan..... (X₁₁)

Konsultasi dan Fasilitasi

Kegiatan konsultasi dan fasilitasi terbatas pada beberapa kelompok PIK R saja. Alur konsultasi dimulai dari teman, pengelola PIK R, wali kelas dan Guru BK :

“...intelegent dari pengurus akan menerima konsultasi dari siswa-siswi dari setiap permasalahan, jika tidak dapat diselesaikan mungkin akan ke wali kelas kemudian ke Guru BK.....(X₁₅)

Menetapkan dan Penerapan Kriteria Isu

Berdasarkan hasil *USG*, terdapat lima keterbatasan yang menjadi prioritas utama yang disajikan dalam tabel 2. Berdasarkan hasil analisis matrik *USG* dengan membuat rangking dari total nilai tertinggi, maka faktor yang menjadi prioritas masalah adalah “Keterbatasan BKBPP Kabupaten Karawang dalam melakukan sosialisasi dan promosi terkait materi dan pelaksanaan PIK R sekolah”, seperti pada tabel 1 :

Tabel 1
Matrik *USG* Pemilihan Isu Aktual dalam Pelaksanaan PIK R pada Remaja SLTP dan SLTA di Karawang Tahun 2015

No	Isu Aktual	U	S	G	Total	Rangking
1	Keterbatasan BKBPP Kabupaten Karawang dalam melakukan koordinasi dengan Pemda Kabupaten Karawang terkait dengan penyusunan PERDA untuk Pelaksanaan PIK R.	5	3	4	12	IV
2	Keterbatasan BKBPP Kabupaten Karawang dalam melakukan sosialisasi dan promosi terkait materi dan pelaksanaan PIK R.	5	5	5	15	I
3	Keterbatasan BKBPP Kabupaten Karawang untuk menjadikan pelaksanaan PIK R sebagai kegiatan Ekstrakurikuler di sekolah	4	4	3	11	V
4	Keterbatasan BKBPP untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan PIK R.	5	4	4	13	III
5	Keterbatasan BKBPP untuk memfasilitasi SDM baik dari kuantitas maupun kualitas dalam pelaksanaan PIK R sekolah	5	4	5	14	II

Sumber : hasil wawancara mendalam Rekomendasi Kebijakan Operasional 2015

Penyebab utama belum optimalnya pelaksanaan PIK R pada remaja SLTP dan SLTA di Karawang adalah masalah sosialisasi dan promosi.

Tabel 2
Matrik SWOT dalam Pelaksanaan PIK R pada Remaja SLTP dan SLTA di Karawang Tahun 2015

SW	STRENGTHS	WEAKNESSES
Internal	1. Didukung oleh peraturan Kepala BKKBN tentang Pengelolaan PIK R	1. Belum memiliki PERDA terkait pelaksanaan PIK R sekolah
	2. Sekolah memberikan jadwal khusus pada saat MOS/PMB dalam kegiatan sosialisasi dan promosi yang dilakukan secara langsung oleh BKBPP dan PLKB	2. Sosialisasi dan promosi masih kurang
	3. Memiliki pembimbing, pengelola, PS dan KS yang sudah mendapatkan orientasi dan pelatihan tentang PIK R	3. Pembimbing dan Pengelola khususnya PS dan KS masih sangat kurang, baik dari kuantitas maupun kualitas dibandingkan dengan jumlah institusi sekolah dan siswa-siswinya
	4. Memiliki buku pedoman pengelolaan PIK R	4. Sarana dan prasarana masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah insitusi sekolah dan siswa-siswinya khususnya media kit, buku pedoman dan ruangan
	5. Memiliki Media Kit PIK R	5. Belum memiliki <i>Blue print</i> dan silabus sebagai acuan untuk menjadikan PIK R sebagai Eskul dan Kurikulum tambahan
	6. Adanya satu kelompok PIK R sekolah yang memiliki Eskul PIK R sehingga dapat dijadikan percontohan	6. Belum adanya anggaran dari APBD untuk pelaksanaan PIK R sekolah
	7. Tersedianya anggaran dari APBN, dana BOS dan dana dari kegiatan BK di sekolah	7. Pembentukan dan perkembangan PIK R belum menyeluruh dan belum efektif
	8. Adanya komitmen dari PLKB untuk membina sekolah-sekolah yang ada di wilayah kerjanya	8. Adanya sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan dukungan dari sekolahnya setelah mendapatkan promosi, sosialisasi dan dibentuk PIK R serta tidak aktif dalam kegiatan sekolah.
	9. Adanya dukungan dari Kepala sekolah dan Guru BK serta siswa-siswa yang aktif	9. Sebagian besar kelompok PIK R belum memiliki target, jadwal dan sistem pencatatan dan pelaporan
Eksternal		

OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<p>1. Bupati Karawang seorang dokter yang cukup peduli dengan kesehatan remaja</p> <p>2. Kabupaten Karawang memiliki Media informasi yaitu Kemuning TV, TV Berita, Sturada Radio, Radio DSK, Koran Radar Karawang dan yang lainnya</p> <p>3. Akses terhadap Teknologi Informasi mudah diakses</p> <p>4. Adanya kerjasama dengan BNN dan KPA</p> <p>5. Kabupaten Karawang merupakan daerah industri yang dapat dijadikan sponsor dan mitra kerja dalam pelaksanaan PIK R sekolah</p> <p>6. Memiliki tiga institusi sekolah kesehatan yang dapat dijadikan Mitra sebagai Kakak Asuh/Teman Sebaya</p> <p>7. Keadaan geografis yang dapat dijangkau kendaraan umum dapat mempermudah proses pembinaan, konsultasi, monitoring dan evaluasi</p>	<p>Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p> <p>1. Membuat <i>MOU</i> sebagai bentuk kerjasama secara tertulis dengan Disdikpora, Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Perusahaan-perusahaan, BNN, KPA, dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Karawang dilanjutkan menyusun rencana kegiatan</p>	<p>Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p> <p>1. Membuat 11 system Teknologi Informasi dan memanfaatkan media informasi (TV, radio, surat kabar) yang ada di Kabupaten Karawang untuk melakukan sosialisasi dan promosi terkait pelaksanaan PIK R sekolah</p>

TREATHS (T)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Koordinasi dengan instansi terkait khususnya Disdikpora kurang 2. PIK R sekolah belum dikenal secara menyeluruh 3. Banyaknya kegiatan Ekskul di sekolah 4. Mutasi dari kepala sekolah, Guru BK dan pengelola khususnya PS dan KS yang sudah memahami, mendukung PIK R sekolah serta terlatih 5. Jadwal PBM di sekolah sangat padat 6. Adanya Guru BK yang sudah mendapatkan promosi dan sosialisasi tidak setuju dengan PIK R sekolah 7. PIK R sekolah dianggap kurang penting dibandingkan dengan program KB lainnya	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman 1. Menyusun Pedoman (<i>Blue Print</i> , Silabus, SOP) untuk kegiatan Eskul PIK R dan Kurikulum Tambahan	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman 1. Koordinasi antara BKBPP, Disdikpora dan PEMDA untuk menyusun PERDA tentang pelaksanaan PIK R

Sumber : hasil wawancara mendalam Rekomendasi Kebijakan Operasional 2015

Berdasarkan analisis USG dan SWOT, diperlukan rekomendasi kebijakan guna mengoptimalkan pelaksanaan PIK R, dengan membuat *MOU* yang lebih cepat dan mudah diaplikasikan, bersifat wajib dan mengikat yang merupakan kesepakatan tertulis. Hambatan yang mungkin dihadapi adalah pengontrolan yang kurang akan menyebabkan pihak terkait tidak optimal untuk melaksanakannya. *MOU* dapat dilakukan

dengan Disdikpora, Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Perusahaan-perusahaan, BNN, KPA, Media Informasi dan instansi terkait yang ada di Kabupaten Karawang dilanjutkan dengan menyusun rencana kegiatan.

Untuk memperkuat pembuatan *MOU* dilakukan wawancara mendalam dengan narasumber sebagai *expert judgment* berasal dari stakeholder dari DPRD Komisi D, BKBPP, Disdikpora, dan Kepala Sekolah. Seluruh narasumber menyatakan bahwa *MOU* tersebut merupakan alternatif kebijakan operasional yang memiliki daya tarik paling tinggi. Berikut hasil wawancara dengan salah satu narasumber:

“*MOU* memiliki daya tarik paling tinggi karena lebih cepat diaplikasikan dan sifatnya wajib bagi pihak-pihak terkait.....”(Y₅)

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Kedua pihak memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak¹¹. Kemitraan yang dilakukan oleh bidang kesehatan adalah kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri¹².

Hasil penelitian sesuai dengan teori karena selama ini PEMDA sudah melakukan *MOU* dengan APINDO melalui CSR, tetapi tidak terkontrol. Selain itu BKBPP juga melakukan *MOU* dengan 8 perusahaan bernama KB perusahaan dan di dalamnya terdapat program remaja, namun belum optimal. BKBPP harus membuat jejaring *MOU* lebih luas lagi dengan instansi pemerintah atau swasta. Draf *MOU* yang dibuat sesuai dengan hasil penelitian mendapatkan respon positif dari seluruh

narasumber untuk segera dipergunakan, diperkuat dengan Surat Keputusan dari Kepala BKBPP.

Kesimpulan

Permasalahan kebijakan operasional yang ditemukan adalah belum adanya kebijakan operasional yang mengatur pelaksanaan PIK R pada remaja SLTP dan SLTA di Kabupaten Karawang pada Tahun 2015. Kriteria evaluasi yang didapatkan adalah keterbatasan dalam melakukan sosialisasi dan promosi, SDM, penyusunan PERDA, dan kurikulum tambahan ataupun ekstrakurikuler. Terdapat rekomendasi kebijakan operasional dalam mengurai permasalahan dalam pelaksanaan PIK R tersebut.

Saran

BKBPP dengan intansi terkait segera merealisasikan rekomendasi kebijakan operasional tentang pembuatan *MOU* dengan cara penandatanganan *MOU* dengan intansi terkait.

Daftar Pustaka

1. BKKBN. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) ditinjau dari aspek 8 fungsi keluarga, kesehatan, ekonomi, psikologi, pendidikan, agama dan sosial. Bandung.SUSEDA Jabar; 2011.
2. SDKI. Sensus Penduduk; 2011.
3. SUSEDA; Jabar; 201.

4. Sensus penduduk; 2010.
5. Notoatmodjo. Ilmu perilaku kesehatan: Rineka Cipta. Jakarta; 2010.
6. SDKI. Sensus penduduk; 2007.
7. BKKBN, BPS, KEMENKES, MEASURE DHS, ICF International, SDKI. Kesehatan reproduksi remaja. Jakarta; 2012.
8. BKKBN. Pedoman pengelolaan pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa (PIK-R/M). Jakarta; 2014.
9. BKBPP. Buku laporan kegiatan; Karawang; 2014
10. BKBPP. Rakerda pembangunan KB dan PP Kabupaten Karawang Tahun 2015. Optimalisasi kinerja program KB, pembangunan keluarga dan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan target sasaran renstra dan RPJMD Tahun 2011-2015 menuju keluarga kecil berkualitas. Karawang; 2015.
11. Jaja. Pengembangan silabus pembelajaran bahasa Indonesia berbasis kolaborasi. Jurnal kajian bahasa dan dan sastra Indonesia. Artikulasi; Universitas Swadaya Gunung Djati. Cirebon. Vol 10; No; 1; 2011.

Budiwati. Membangun kerjasama usaha. UPI; 2013